

Judul : Pembahasan Makro RAPBN 2017 Rampung
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 13

Pembahasan Makro RAPBN 2017 Rampung

● EKO SUPRIYADI

JAKARTA — DPR dan pemerintah telah selesai menyampaikan pandangan masing-masing untuk membahas kerangka ekonomi makro dalam RAPBN 2017. Penyampaian pandangan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pandangan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dinilai telah memperhatikan kondisi terkini bangsa. Dengan begitu, DPR menganggap pemerintah telah merespons, mengolah, mengakomodasi, dan mengodifikasi seluruh masukan dari setiap fraksi.

Setelah mendengar tanggapan pemerintah tersebut, DPR melalui fraksi dan badan anggaran melakukan pendalaman atas pandangan pemerintah. Dengan demikian, tindak lanjut dari kerangka RAPBN itu diserahkan sepenuhnya dalam dinamisasi pembahasan proses oleh dua unsur di DPR tersebut.

“Setelah siklus pembahasan APBN 2017, DPR langsung akan tancap gas membahas dua hal, yaitu RAPBN 2017 dan tentunya secara simultan sembari menunggu Tax Amnesty, akan dibahas revisi UU APBN 2016, dalam bentuk APBNP 2016,” kata Taufik se usai memimpin rapat paripurna.

Politikus PAN tersebut menegaskan, dalam penyampaian tanggapannya, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau menerima pandangan fraksi-fraksi, tetapi mereka melakukan proses matrikulasi dan kodifikasi usulan mana saja yang bisa diharmonisasikan.

Taufik mengungkapkan, DPR menargetkan RAPBN 2017 rampung pada 15 Agustus 2016. Rencananya, RAPBN 2017 itu akan disampaikan oleh Presiden saat penyampaian nota keuangan dalam bentuk APBN 2017.

Mengenai angka pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan mempertimbangkan berbagai peluang, potensi, dan risiko, baik yang berasal dari domestik maupun eksternal, asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2017 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,3 sampai 5,9 persen cukup realistis.

Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global, terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia pada 2017, diharapkan dapat membantu perbaikan kinerja perekonomian nasional. “Sementara itu, faktor domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, diperkirakan masih menjadi penopang utama perbaikan kinerja perekonomian nasional pada 2017,” kata Bambang.

Ia menambahkan, perkiraan

laju inflasi yang relatif terkendala, perluasan cakupan program kesejahteraan sosial, serta struktur demografi yang didominasi kelompok penduduk usia produktif, diharapkan menjadi faktor pendorong kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Kinerja investasi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur serta penguatan iklim investasi dan kondisi dunia usaha di Indonesia.

Terkait dengan perkiraan asumsi inflasi serta permasalahan inflasi dan potensi tekanan, Bambang melanjutkan, saat ini potensi risiko yang berasal dari inflasi komponen bergejolak perlu dicermati bersama seiring dengan pergeseran musim tanam dan faktor musiman lainnya.

Oleh karena itu, pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok sangat perlu dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari sisi produsen, distribusi, hingga tingkat konsumen. Perbaikan infrastruktur desa ke kota dan infrastruktur konektivitas lainnya, juga dinilai penting guna menekan biaya distribusi bahan kebutuhan pokok.

“Pemerintah juga telah menyiapkan dana cadangan stabilitas harga pangan dan cadangan besar guna mendukung peningkatan ketahanan pangan,” kata Menkeu. ■ ed: eh ismail